



EDISI KAMIS 06 AGUSTUS 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Pemerintah Klaim Ekonomi Tumbuh, Kemiskinan dan Pengangguran Capai Rekor Terendah

04

NUSANTARA
Febrie Adriansyah Masih Terima Gaji Meski Tinggal Separuh

10

LISTSTYLE
Stripes Kembali Jadi Primadona, Motif Klasik Segala Gaya

UTANG WHOOSH KINI DI TANGAN PURBAYA

60% Saham KCIC Diambil Alih Kemenkeu

Hampir setahun setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan, "kalau saya mending nggak bayar", saat membahas opsi penyelesaian utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh), kondisi sebaliknya kini terjadi. Pemerintah kini mengalihkan penanganan restrukturisasi proyek tersebut dari Danantara kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Selain menangani restrukturisasi, Kemenkeu juga akan mengelola 60 persen saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV). Pemerintah belum mengungkapkan besaran utang yang akan direstrukturisasi karena masih dalam proses penghitungan dan ditargetkan diumumkan bersamaan dengan rampungnya pengalihan aset pada pertengahan September 2026. Restrukturisasi dilakukan terhadap proyek Whoosh yang nilai investasinya membengkak dari sekitar US\$6,07 miliar menjadi US\$7,27 miliar. Skema pembiayaan proyek tersebut terdiri atas sekitar 75 persen pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan sekitar 25 persen ekuitas yang disetor konsorsium Indonesia dan China. BACA HAL 11...

PT WIKA

 Rugi PSBI Q1-2026
Rp 483,8 miliar Rugi bersih
Rp 1,13 triliun

PT KAI

 Laba Semester I-2026
Turun 73,4% → Rp314 miliar Rugi investasi PSB
Rp2,99 triliun (6 bulan) Akumulasi rugi PSBI:
2024: Rp2,22 T | 2025: Rp2,92 T Nilai investas
Rp7,72 T → Rp1,79 T

BEBAN WHOOSH

 Diperkirakan
Rp 1,7-1,8 triliun/tahun

PEMERINTAH KLAIM EKONOMI TUMBUH, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN CAPAI REKOR TERENDAH

Pemerintah mengklaim kondisi perekonomian Indonesia terus membaik sepanjang paruh pertama 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi tetap berada di atas 5 persen, sementara angka kemiskinan dan pengangguran turun ke level terendah dalam puluhan tahun. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Capaian itu memang melambat dibanding triwulan I-2026 yang sebesar 5,61 persen, tetapi masih lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,12 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud mengatakan pertumbuhan tersebut ditopang oleh produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.552,1 triliun dan PDB atas dasar harga konstan Rp3.576,2 triliun.

"Pertumbuhan ekonomi triwulan II-2026 dibandingkan triwulan II-2025 atau year on year tumbuh 5,29 persen," kata Edy dalam konferensi pers, Rabu (5/8/2026).

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, BPS juga melaporkan jumlah penduduk miskin terus menurun. Per Maret 2026, jumlah penduduk miskin tercatat 22,93 juta orang atau 8,07 persen dari total penduduk. Angka itu turun 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta jiwa atau 8,25 persen.

Penurunan tersebut menjadi capaian terendah setidaknya sejak 1999 atau hampir tiga dekade terakhir. Secara spasial, penurunan kemiskinan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Pulau Jawa mencatat penurunan terbesar, meski masih menjadi rumah bagi sekitar 12,02 juta penduduk miskin atau 52,42 persen dari total penduduk miskin nasional.

BPS juga menetapkan garis kemiskinan nasional pada Maret 2026 sebesar Rp669.235 per kapita per bulan. Jika dikonversi berdasarkan rata-rata anggota rumah tangga miskin yang berjumlah 4,62 orang, garis kemiskinan rumah tangga nasional mencapai Rp3.091.866 per bulan.

Selain kemiskinan, indikator ketenagakerjaan juga menunjukkan perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Mei 2026 turun menjadi 4,65 persen dari 4,68 persen pada Februari 2026. Menurut BPS, angka tersebut merupakan tingkat pengangguran terendah sejak 1994 atau dalam 32 tahun terakhir.

"TPT Mei 2026 merupakan yang terendah sejak 1994. Saat itu, berdasarkan Sakernas, TPT tercatat sebesar 4,6 persen," tulis BPS.

Secara absolut, jumlah pengangguran juga menyusut dari 7,24 juta orang menjadi 7,22 juta orang. Pada saat yang sama, jumlah penduduk bekerja meningkat menjadi 148,19 juta orang atau bertambah sekitar 522 ribu orang dibanding Februari 2026.



Pencari kerja memadati Job Fair Depok 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok di Depok Town Square (Detos), Rabu (5/8/2026). ist

Mayoritas pekerja merupakan pekerja penuh waktu yang mencapai 98,98 juta orang atau bertambah sekitar 391 ribu orang. Sementara pekerja paruh waktu meningkat menjadi 38,41 juta orang dan kelompok setengah pengangguran bertambah menjadi 10,78 juta orang.

Kritik CELIOS: Belum Berkualitas dan Timpang

Di balik klaim pemerintah mengenai pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan membaiknya pasar kerja, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menyisakan persoalan mendasar. Lembaga tersebut menyoroti meningkatnya ketimpangan, memburuknya kondisi kemiskinan di pedesaan, hingga kualitas lapangan kerja yang dinilai belum mengalami perbaikan berarti.

Peneliti CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen belum dinikmati secara merata. Menurutnya, manfaat pertumbuhan justru lebih banyak mengalir kepada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

"Terjadi lonjakan ketimpangan ekonomi, baik di pedesaan dan perkotaan. Gini Ratio nasional naik dari 0,363 menjadi 0,368. Gini perkotaan dan pedesaan sama-sama mengalami kenaikan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).

Media menilai tingkat ketimpangan yang sesungguhnya kemungkinan lebih tinggi daripada yang tergambar dalam data resmi. Alasannya, metodologi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) belum mampu menangkap kepemilikan kekayaan yang terkonsentrasi pada

kelompok orang terkaya di Indonesia.

"Ketimpangan ekonomi diperkirakan jauh lebih tinggi karena metodologi pengukuran kesejahteraan di data Susenas tidak bisa menangkap kepemilikan kekayaan nasional yang terpusat pada sekitar 50-100 orang superkaya Indonesia," katanya.

CELIOS menduga meningkatnya ketimpangan dipicu oleh berkurangnya belanja pemerintah daerah akibat pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat. Selain itu, pelaksanaan sejumlah program strategis nasional juga dinilai belum menghasilkan distribusi manfaat yang merata.

Menurut Media, sebagian manfaat fiskal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru lebih banyak dinikmati pemilik modal yang mengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mengingat investasi untuk membangun satu dapur dapat mencapai miliaran rupiah.

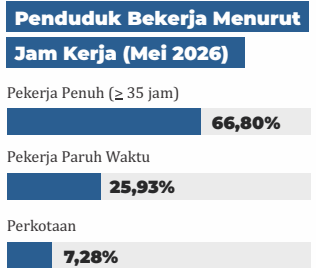
Sorotan lain diarahkan pada kondisi kemiskinan di pedesaan. Meski jumlah penduduk miskin secara nasional menurun, indeks keparahan kemiskinan (P2) di desa justru meningkat sekitar 6 persen.

"Kelompok yang paling miskin justru semakin tertinggal," ujar Media.

Ia menilai kondisi tersebut dipengaruhi oleh perubahan sasaran penerima bantuan sosial, sehingga beberapa kelompok masyarakat tidak lagi memperoleh program bansos tertentu. Di sisi lain, jumlah penerima bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), maupun beasiswa disebut tidak mengalami peningkatan signifikan

KEADAAN KETENAGAKERJAAN INDONESIA MEI 2026

Tingkat Pengangguran Terbuka	4,65%
Pekerja Penuh (≥35 jam)	98,98 juta orang (66,80%)
Pekerja Tidak Penuh (1-34 jam)	49,21 juta orang (33,20%)



dalam setahun terakhir.

CELIOS juga mengkritik pengurangan dana desa yang sebagian dialihkan untuk pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurut Media, pemangkasan dana desa hingga sekitar 50-70 persen membuat berbagai program padat karya berkurang drastis sehingga menghambat perputaran ekonomi di desa. (gus,rls,kcm/dya)

UANG KEJAHATAN LINGKUNGAN RP994 T, DIUSULKAN MASUK RUU PERAMPASAN ASET

Perputaran uang 'panas' dari kejahatan lingkungan di Indonesia diperkirakan mencapai Rp994 triliun. Nilai yang merujuk pada data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) itu kini menjadi salah satu alasan menguatnya dorongan agar kejahatan keuangan berbasis lingkungan (green financial crime) dimasukkan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Usulan tersebut muncul di tengah pembahasan RUU Perampasan Aset yang mulai dipercepat DPR.

Dengan memasukkan kejahatan lingkungan ke dalam regulasi tersebut, pemerintah berharap negara tidak hanya dapat menghukum pelaku perusakan lingkungan, tetapi juga mengambil kembali keuntungan ekonomi yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Advokasi dan Penguatan Partisipasi Publik, Yudi Syamhudi Suyuti, mengatakan nilai Rp994 triliun itu menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan telah berkembang menjadi kejahatan ekonomi berskala besar. Menurut dia, praktik seperti pembalakan liar, pertambangan ilegal, pencemaran, hingga perusakan kawasan konservasi menghasilkan aliran dana yang sangat besar dan selama ini belum sepenuhnya dapat dipulihkan oleh negara.

"Diperlukan payung hukum undang-undang untuk menguatkan penindakan atau penegakan hukum dalam kasus ini," kata Yudi dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).

Ia mengatakan, selama ini aparat penegak hukum memang dapat menjerat pelaku tindak pidana lingkungan menggunakan berbagai regulasi yang sudah ada. Namun, proses untuk menelusuri asal-usul kekayaan, membekukan aset, hingga mengembalikan hasil kejahatan kepada negara masih menghadapi berbagai kendala.

Karena itu, Yudi mengusulkan agar green financial crime secara eksplisit diatur dalam RUU Perampasan Aset. Dengan dasar hukum tersebut, aparat dinilai akan lebih mudah menelusuri aliran dana hasil kejahatan lingkungan, menyita aset yang diduga berasal dari tindak pidana, sekaligus memulihkan kerugian negara maupun lingkungan.

Menurut dia, kejahatan lingkungan memiliki karakter berbeda dibanding tindak pidana konvensional. Kerusakan yang ditimbulkan tidak hanya berupa hilangnya sumber daya alam, tetapi juga berdampak pada kualitas udara, tanah, sungai, dan laut yang pada akhirnya memengaruhi kehidupan masyarakat.

Yudi juga mengusulkan agar Kementerian Lingkungan Hidup atau Badan Pengendalian Lingkungan



Kematian massal biota akuatik di sepanjang aliran Sungai Jaletreng hingga Sungai Cisdane. Dampak pencemaran ini terdeteksi sejauh 22,5 kilometer, meliputi wilayah Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, hingga Kabupaten Tangerang, Banten, 12 Februari 2026. (Antara.dok)

Hidup menjadi salah satu lembaga utama dalam pelaksanaan regulasi tersebut. Alasannya, kementerian memiliki perangkat penegakan hukum sekaligus kemampuan memetakan tingkat kerusakan lingkungan di berbagai wilayah.

Pemetaan itu mencakup kerusakan di kawasan daratan, bawah tanah, sungai, danau, laut, hingga pencemaran udara. Data tersebut dinilai penting untuk menghubungkan aktivitas perusakan lingkungan dengan keuntungan ekonomi yang diperoleh pelaku.

Selain perubahan regulasi, Kementerian Lingkungan Hidup juga menggagas pembentukan Satuan Tugas Khusus Penyelamatan Lingkungan Hidup (Satgassus SPLH).

"Satuan tugas tersebut dirancang untuk menjalankan fungsi pencegahan, penindakan, dan pemulihan lingkungan hidup," ujar Yudi.

Satgassus itu diusulkan beranggotakan Kementerian Lingkungan Hidup, PPATK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga bantuan hukum, hingga unsur masyarakat sipil. Menurut Yudi, kolaborasi lintas lembaga diperlukan karena kejahatan lingkungan kerap berkaitan dengan pencucian uang, korupsi, hingga tindak pidana terorganisasi.

Ia berharap keberadaan Satgassus SPLH nantinya tidak hanya berfungsi mengejar pelaku, tetapi juga

memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan untuk mendukung pemulihan lingkungan.

"Dengan memasukkan penanganan green financial crime dan penguatan peran Satgassus SPLH ke dalam UU Perampasan Aset, negara diharapkan lebih mudah mengambil kembali aset bernilai ratusan hingga ribuan triliun rupiah yang diduga diperoleh dari praktik perusakan lingkungan," kata Yudi.

DPR Percepat Pembahasan

Dorongan memasukkan kejahatan lingkungan ke dalam RUU Perampasan Aset muncul bersamaan dengan percepatan pembahasan regulasi tersebut di DPR.

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembentukan RUU Perampasan Aset kini memasuki tahap penyusunan draf. Menurut dia, Komisi III ingin memastikan regulasi tersebut disusun secara partisipatif dengan melibatkan sebanyak mungkin masukan dari masyarakat.

"RUU Perampasan Aset ini akan kita gaspol dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Jadi sekarang kita sedang menyusun draf undang-undang, kita mau masukkan sebanyak-banyaknya dari masyarakat," ujar Habiburokhman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama praktisi hukum Juniver Girsang dan Maqdir Ismail di Kompleks Parlemen,

KEJAHATAN LINGKUNGAN YANG MENONJOL DI INDONESIA

Tambang Timah Bangka Belitung

- Tambang ilegal di wilayah PT Timah.
- Kerugian lingkungan diperkirakan Rp271 triliun.
- Merusak ekosistem darat dan laut.

Pencemaran Sungai Cisdane

- Sekitar 20 ton pestisida mencemari sungai.
- Dampak hingga 22,5 km.
- Biota mati massal, pasokan air Tangerang terganggu.

Gugatan 6 Perusahaan di Sumut

- KLH menggugat enam perusahaan.
- Nilai gugatan Rp4,84 triliun.
- Salah satu gugatan lingkungan terbesar.

Deforestasi dan Karhutla

- Pembukaan lahan dengan tebang-bakar.
- Terjadi di Kalimantan dan Papua.
- Memicu kabut asap dan kerusakan habitat.

Limbah B3 ke Sungai

- Limbah berbahaya mencemari sungai dan air tanah.
- KLH menyalah 8 perusahaan.
- Mengancam kesehatan masyarakat.

Senin (3/8/2026).

Menurut dia, pembahasan RUU tidak hanya dilakukan melalui rapat di DPR. Selama masa reses, anggota Komisi III juga turun langsung ke daerah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Habiburokhman mengatakan pihaknya telah mengunjungi Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Dari tiga provinsi tersebut, DPR menerima berbagai masukan mengenai mekanisme perampasan aset, perlindungan hak masyarakat, hingga efektivitas penegakan hukum.

"Di masa reses ini, kemarin kami mengunjungi tiga daerah, Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat terkait RUU Perampasan Aset ini," katanya.

Seluruh masukan tersebut, kata Habiburokhman, akan menjadi bahan penyempurnaan naskah akademik dan draf RUU sebelum masuk ke tahapan pembahasan yang lebih intensif. (wid,ist,rls,kum/dya)

FEBRIE ADRIANSYAH MASIH TERIMA GAJI MESKI TINGGAL SEPARUH

Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah masih tercatat sebagai jaksa aktif, meski kini berstatus diberhentikan sementara. Artinya, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), Febrie belum kehilangan seluruh hak kepegawaianya. Ia masih menerima gaji dari negara, tetapi jumlahnya dipangkas menjadi hanya separuh atau 50 persen dari gaji pokok.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) Anang Supriatna menjelaskan, pemberhentian sementara berbeda dengan pemberhentian tetap. Selama belum ada putusan hukum berkekuatan tetap atau inkrah, Febrie masih berstatus sebagai aparatur kejaksaan.

"Kalau (diberhentikan) sementara, dia hanya menerima gaji pokok 50 persen saja," kata Anang di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Rabu (5/8/2026).

Dengan status tersebut, Febrie tidak lagi mendapatkan tunjangan yang melekat pada jabatannya.

Sebelumnya, ia menduduki posisi strategis sebagai Jampidsus, jabatan yang membawahi penanganan perkara korupsi dan kejahatan ekonomi di tubuh Korps Adhyaksa.

"Nanti kalau sudah ada putusan inkrah, baru (dipecat)," ujar Anang.

Jadi, jika memakai simulasi kasar, penghasilan Febrie sebagai Jampidsus yang sebelumnya bisa berada di kisaran puluhan juta rupiah per bulan, turun menjadi hanya sekitar Rp2-3 juta per bulan selama status pemberhentian sementara berlaku.

Sebagai pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung, posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memiliki

komponen penghasilan yang tidak hanya berasal dari gaji pokok, tetapi juga tunjangan kinerja dan tunjangan lain. Dalam simulasi, seorang Jampidsus dengan golongan tinggi jaksa (sekitar IV/d hingga IV/e) dapat memiliki gaji pokok di kisaran Rp3,8 juta hingga Rp6,3 juta per bulan. Jika menggunakan angka tengah, gaji pokoknya diperkirakan sekitar Rp5 juta per bulan.

Selain gaji pokok, komponen terbesar berasal dari tunjangan kinerja (tukin). Jabatan Jampidsus termasuk posisi struktural tinggi di Kejaksaan dengan kelas jabatan sekitar 18, yang dalam simulasi memiliki tukin sekitar Rp38,2 juta per bulan.

Ditambah kemungkinan tunjangan lain seperti tunjangan jabatan, keluarga, dan pangan sesuai ketentuan ASN, total penghasilan seorang Jampidsus sebelum pemberhentian sementara dapat mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Pemberhentian sementara Febrie dilakukan setelah Jaksa Agung ST Burhanuddin menerbitkan keputusan terkait status kepegawaianya. Kejagung menyebut langkah itu diambil karena Febrie

telah berstatus tersangka.

Anang mengatakan pemberhentian sementara berlaku hingga perkara yang menjerat Febrie memiliki kekuatan hukum tetap.

"Benar saat ini FA (Febrie) sudah diberhentikan sementara sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah," kata Anang, Selasa (4/8/2026).

Kasus yang menjerat Febrie berkaitan dengan dugaan TPPU yang disebut terkait dengan jabatan dan kewenangannya selama menjadi jaksa maupun pejabat struktural di Kejaksaan.

Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono sebelumnya menyebut dugaan TPPU tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara saat menjalankan tugasnya.

"Modus secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat, mengabdikan diri di kejaksaan," kata Rudi di Gedung Kejagung, Jakarta, Jumat (4/8/2026).

Namun, Kejagung belum membuka detail konstruksi perkara maupun dugaan modus pencucian uang yang disangkakan kepada Febrie. Menurut Rudi, informasi tersebut masih berkaitan dengan kepentingan pembuktian dalam penyidikan.

"Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian. Kalau kita sampaikan akan menyulitkan kita ke depannya," ujarnya.

Status tersangka Febrie juga menuai perlawanan dari pihak kuasa hukum. Tim hukum mempertanyakan proses penetapan tersangka yang dinilai memiliki sejumlah persoalan hukum acara. Pengacara Febrie, Febri Diansyah, menyebut pihaknya menemukan sejumlah kejanggalan setelah mempelajari proses penanganan perkara.

"Kami mengidentifikasi setidaknya ada sembilan kejanggalan atau indikasi pelanggaran hukum acara dalam penanganan perkara dengan tersangka Pak FA yang ditangani oleh Kejaksaan Agung," kata Febri. (kum,ist/dya)



Tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Suap batu bara hingga kasus Asabri Don Ritto tiba di Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jakarta. (dok)

Geledah Rumah Don Ritto di Bandung

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) kembali melakukan langkah penyidikan dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah. Kali ini, penyidik mengeledah rumah milik Don Ritto (DR) di kawasan Bandung, Jawa Barat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan, penggeledahan dilakukan untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang

ditangani penyidik.

"Tim penyidik melakukan penggeledahan satu tempat di daerah Bandung milik dari saudara DR," kata Anang kepada wartawan, Rabu (5/8/2026).

Dari lokasi tersebut, penyidik menemukan sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara Don Ritto maupun Febrie Adriansyah.

"Diperoleh beberapa dokumen yang diduga ada keterkaitan dengan perkara DR sendiri dan FA," ujar Anang.

Selain melakukan penggeledahan, penyidik juga memeriksa sejumlah

saksi untuk memperkuat konstruksi perkara. Anang menyebut pemeriksaan dilakukan secara paralel dengan pengeledahan.

"Kemarin itu ada lima orang saksi diperiksa, semuanya dari pihak swasta," katanya.

Dalam perkara dugaan TPPU tersebut, Kejagung melalui Tim Sembilan telah menetapkan dua tersangka, yakni Febrie Adriansyah dan Don Ritto. Keduanya kini telah menjalani penahanan.

Kasus ini berkaitan dengan temuan aset berupa emas sekitar 74 kilogram dan uang ratusan miliar rupiah yang ditemukan saat penggeledahan sejumlah lokasi, termasuk kediaman Febrie di kawasan Sentul.

Kejagung menduga aset tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang tengah disidik. Namun, penyidik masih mendalami asal-usul aset serta hubungan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. (wid,ist/dya)

UPT PPP PONDOKDADAP DUKUNG PENELITIAN DNA IKAN TANGKAPAN

MALANG-UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Pondokdadap mendampingi pelaksanaan pengambilan sampel DNA ikan yang didaratkan dan dipasarkan di kawasan pelabuhan oleh tim mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Brawijaya, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian akademik yang bertujuan mengkaji keanekaragaman genetik berbagai jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan di PPP Pondokdadap.

Pengambilan sampel dilakukan secara langsung pada ikan hasil tangkapan nelayan yang baru saja didaratkan maupun yang telah dipasarkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Setiap ikan yang dijadikan sampel terlebih dahulu dilakukan identifikasi spesies secara teliti, kemudian diambil contoh jaringan sesuai prosedur penelitian yang berlaku guna menjamin keakuratan hasil analisis. Seluruh proses didampingi petugas UPT PPP Pondokdadap guna memastikan kegiatan berjalan lancar, tertib, serta tidak mengganggu aktivitas pendaratan dan perdagangan ikan yang berlangsung sehari-hari.

Penelitian ini diharapkan



menghasilkan data ilmiah yang akurat dan terpercaya mengenai tingkat keragaman genetik ikan di perairan selatan Jawa Timur. Informasi tersebut menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan, termasuk upaya perlindungan jenis-jenis ikan tertentu, pemantauan kondisi populasi, serta

penentuan batas tangkapan yang wajar agar ketersediaan ikan tetap terjaga bagi masa depan.

Selain itu, data hasil penelitian ini juga bermanfaat untuk mendeteksi perubahan jenis ikan yang didaratkan, memantau pengaruh lingkungan terhadap populasi ikan, serta menjadi acuan dalam menyusun strategi pembinaan dan pengembangan usaha

perikanan tangkap di wilayah kerja PPP Pondokdadap. Dengan demikian, pengelolaan perikanan tidak hanya berbasis pengalaman, melainkan juga didukung fakta dan data ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui kegiatan ini, UPT PPP Pondokdadap menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kelautan dan perikanan. Sinergi antara institusi pendidikan dan pengelola pelabuhan diharapkan terus diperkuat agar pengelolaan sumber daya perikanan dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para nelayan, pelaku usaha, dan masyarakat luas. (Adv)



Kemenkes soal Komentar Nakes ke Pasien BPJS, Soroti Empati hingga Profesionalisme

JAKARTA-Polemik dugaan komentar tidak berempati yang dilontarkan sejumlah tenaga kesehatan terhadap seorang pasien peserta BPJS Kesehatan yang mengeluhkan harus menunggu ruang rawat inap selama delapan jam terus bergulir.

Setelah kasus itu memicu kemarahan publik, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meminta tenaga medis mengedepankan empati dan menjaga profesionalisme, termasuk saat menggunakan media sosial.

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Aji Muhawarman, mengatakan setiap tenaga medis maupun tenaga kesehatan semestinya menyikapi berbagai persoalan yang muncul di masyarakat dengan komunikasi yang baik.

"Pada konteks ini harus bijak dalam

bermedia sosial. Hal ini juga merupakan bagian dari profesionalisme tenaga medis dan tenaga kesehatan," kata Aji dalam keterangan tertulis, Rabu (5/8/2026).

Aji juga mengingatkan masyarakat untuk menempuh jalur resmi apabila menemukan dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi yang dilakukan tenaga kesehatan.

"Kami mengimbau agar disampaikan melalui mekanisme pengaduan di Konsil Kesehatan Indonesia (KKI), sehingga dapat diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

Pernyataan Kemenkes muncul setelah viral unggahan seorang pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bernama Yurizal yang mengeluhkan lamanya menunggu kamar rawat inap.

Dalam unggahannya di media

sosial, Yurizal menulis, "8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS nya, soalnya gue pake bpjs."

Unggahan tersebut kemudian dibanjiri komentar, termasuk dari akun yang diduga milik tenaga kesehatan. Setelah belakangan beredar kabar bahwa Yurizal meninggal dunia, tangkapan layar komentar-komentar tersebut kembali ramai dibagikan dan memicu perdebatan mengenai etika tenaga medis di ruang digital.

Salah satu komentar yang paling banyak disorot berasal dari dokter Beni Christian Sihombing melalui akun Threads @bennychrstn. Dokter yang diketahui bertugas di RSUD Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur, itu dinilai warganet menunjukkan sikap yang tidak berempati terhadap pasien.

"Kalo full, mau dipindahkan kemana? mau di lantai? Gk ada hubungannya sama BPJS atau nggak.

BPJS yg make banyak, otomatis yg dirawat juga banyak, ga cuma u sendiri. Kalo mau pindah cepat, noh ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah, nakes/RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin, masyarakatnya malah gini," tulisnya.

Komentar tersebut memicu gelombang kritik. Identitas pemilik akun hingga tempatnya bekerja ikut menjadi sorotan publik. Sejumlah tenaga kesehatan lain yang sempat memberikan komentar serupa juga dilaporkan menyampaikan klarifikasi setelah polemik meluas.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan lebih dulu menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya peserta JKN tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah, menegaskan setiap peserta yang kepesertaannya aktif berhak memperoleh layanan kesehatan sesuai ketentuan. (tin,rls,ist/dya)

Bansos Sebesar Rp8,2 M di Kota Malang Tak Terserap



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, ditemui di Balai Kota Malang, Rabu (5/8/2026). (Santi/Lentera)

MALANG- Anggaran bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sepanjang 2025 belum terserap secara maksimal. Dari total pagu Rp17,7 miliar, masih terdapat Rp8,2 miliar yang tidak terealisasi hingga akhir tahun anggaran.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menjelaskan, sisa anggaran tersebut tersebar di sejumlah program bantuan sosial. Salah satu yang terbesar berada

di Sekretariat Daerah dengan pagu Rp8,1 miliar. Dari jumlah itu, realisasi anggaran mencapai Rp7,4 miliar, sehingga masih menyisakan sekitar Rp700 juta.

"Tetapi ada juga program bantuan sosial yang di Dinas PUPRKP, itu justru terserap penuh. Anggaran Rp1 miliar untuk program bedah rumah, itu terealisasi 100 persen hingga akhir 2025," ujarnya, Rabu (5/8/2026).

Menurut Wahyu, tidak seluruh bantuan dapat disalurkan karena terjadi perubahan kondisi penerima manfaat. Sebagian penerima mengundurkan diri, meninggal dunia, hingga berpindah domisili sehingga bantuan yang telah dialokasikan tidak dapat direalisasikan.

Selain itu, terdapat perubahan skema pembiayaan bantuan. Sejumlah warga yang semula direncanakan menerima bantuan melalui APBD

akhirnya memperoleh Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari pemerintah pusat.

"Karena penerima manfaat yang seharusnya ditanggung APBD, dialihkan mendapatkan BLT dari pemerintah pusat," kata Wahyu.

Peralihan skema bantuan tersebut menjadi penyebab terbesar tidak terserapnya anggaran. Tercatat sekitar Rp7,3 miliar tidak terealisasi karena penerima akhirnya memperoleh bantuan dari pemerintah pusat.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan persoalan bantuan sosial masih menjadi keluhan yang sering disampaikan masyarakat saat agenda reses. Mayoritas aduan berkaitan dengan perubahan desil atau data penerima bansos.

Perempuan yang akrab dengan sapaan Mia ini menyebut, masih ditemukan warga yang kondisi ekonominya belum membaik, namun tidak lagi tercatat sebagai penerima bantuan setelah terjadi pembaruan data dari pemerintah pusat.

"Dampaknya bisa merembet ke mana-mana, termasuk hilangnya

akses bantuan pendidikan untuk anak-anak mereka," ujarnya.

Meski perubahan data desil menjadi kewenangan pemerintah pusat, Mia meminta Pemkot Malang tidak hanya menunggu pembaruan data. Menurutnya, pemerintah daerah perlu proaktif memastikan akurasi data penerima bantuan di lapangan.

Pihaknya juga mendorong perangkat daerah mengoptimalkan mekanisme Musyawarah Kelurahan (Muskel) sebagai sarana memverifikasi kondisi warga sekaligus mengusulkan pembaruan data kepada pemerintah pusat. "Akurasi data menjadi kunci agar program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan," tegasnya.

Selain menyoroti persoalan bansos, Mia juga mengingatkan pemerintah mengenai akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, keterbatasan daya tampung sekolah negeri membuat sebagian siswa harus melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta dengan biaya yang lebih tinggi. (Santi/Dya)

Kebakaran Hutan Bromo Meluas ke Malang, Kini 50 Ha Terdampak

MALANG- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) meluas hingga memasuki wilayah Kabupaten Malang. Hingga Rabu (5/8/2026), api dilaporkan belum berhasil dipadamkan dan diperkirakan telah menambah luasan area yang terbakar hingga 50 hektare (Ha).

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan titik api yang sebelumnya berada di kawasan Blok Bantengan Bromo kini telah merambat wilayah Kabupaten Malang, tepatnya di kawasan Watu Gede yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo.

"Sampai pagi ini kebakaran sudah masuk ke wilayah Kabupaten Malang. Pasti ada peningkatan luasan karena apinya belum padam. Perkiraan luas lahan yang terbakar saat ini 50 hektare. Dengan jenis vegetasi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar," ujar Sadono, dikonfirmasi pada Rabu (5/8/2026).

Sehari sebelumnya, Selasa (4/8/2026), luas lahan yang terbakar di

kawasan Bromo diperkirakan telah mencapai sekitar 10 hektare. Namun, dengan meluasnya kebakaran ke wilayah Malang, BPBD memperkirakan angka tersebut akan terus bertambah.

Menurut Sadono, kondisi medan menjadi tantangan utama dalam proses pemadaman. Lokasi kebakaran berada di kawasan lereng pegunungan sehingga sulit dijangkau kendaraan maupun peralatan berat.

Karena itu, petugas di lapangan masih mengandalkan penanganan secara manual dengan membuat sekat bakar untuk menghentikan laju api agar tidak terus merambat ke kawasan lain. "Lokasi kebakaran berada di lereng sehingga sulit dijangkau. Kami hanya bisa membuat sekat bakar supaya api tidak semakin menjalar. Penanganan masih dilakukan secara manual," katanya.

Selain membuat sekat bakar, BPBD bersama petugas gabungan juga terus melakukan pemantauan di lokasi. Pembasahan di sejumlah titik juga telah dilakukan menggunakan unit tangki air milik Balai Besar TNBTS, sementara BPBD Provinsi Jawa Timur turut

mengirimkan tambahan satu unit tangki air untuk memperkuat penanganan.

Sementara itu, Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, menjelaskan opsi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) belum memungkinkan diterapkan dalam kondisi saat ini. Menurut-nya, pelaksanaan TMC sangat bergantung pada keberadaan awan yang cukup sebagai media penyemaian. Sementara kondisi atmosfer saat ini masih didominasi cuaca cerah.

Ia juga mengingatkan pembasahan lahan melalui hujan buatan harus dilakukan secara hati-hati karena berpotensi berdampak pada komoditas perkebunan yang sedang memasuki musim panen, seperti hortikultura dan tembakau, yang rentan terhadap hujan.

Menurut Anung, TMC umumnya lebih efektif dilakukan menjelang akhir musim kemarau atau ketika mulai memasuki musim hujan, saat potensi pembentukan awan mulai meningkat.



Petugas gabungan melakukan upaya pemadaman api di lahan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) perbatasan Probolinggo-Kabupaten Malang, Rabu (5/8/2026). (foto: Pusdalops BPBD Kab. Malang)

Untuk penanganan karhutla yang sedang berlangsung, ia menilai metode yang lebih memungkinkan adalah pemadaman secara manual maupun water bombing apabila diperlukan.

"Kalau sampai saat ini penanganannya masih dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan. Water bombing memungkinkan dilakukan, tetapi TMC tetap bergantung pada ketersediaan awan," jelasnya. (Santi/Dya)

KORUT MURKA, TUDING JEPANG KEMBALI JADI 'NEGARA PERANG'

Pernyataan keras kembali dilontarkan Korea Utara (Korut) kepada Jepang. Kali ini, kritik datang langsung dari Kim Yo Jong, adik pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, yang menuding Tokyo sedang menghidupkan kembali militerisme yang pernah membawa Asia ke dalam Perang Dunia II. Dalam pernyataan yang dipublikasikan kantor berita pemerintah Korea Utara, KCNA, pada Rabu (5/8/2026), Kim Yo Jong menyebut Jepang tengah "bertransformasi menjadi negara perang". Hal ini seiring langkah pemerintah Jepang memperbesar anggaran pertahanan, mengembangkan kemampuan serangan jarak jauh, serta memperluas kerja sama militer dengan Amerika Serikat dan sekutunya di kawasan Indo-Pasifik.

Pernyataan tersebut muncul hanya sehari setelah pemerintah Jepang merilis Defence White Paper 2026. Dokumen tahunan itu menegaskan tekad Tokyo mempercepat penguatan kemampuan pertahanan di tengah meningkatnya ancaman dari China, Rusia, dan Korea Utara.

Bagi Pyongyang, perubahan itu bukan sekadar modernisasi militer, melainkan pergeseran besar dari identitas Jepang sebagai negara pasifis yang dibangun setelah kekalahannya pada Perang Dunia II.

"Jepang, negara penjahat perang, mempercepat transformasinya menjadi negara perang," kata Kim Yo Jong.

Ia menegaskan bahwa kepemimpinan Korea Utara tidak akan tinggal diam menghadapi perubahan tersebut.

"Kepemimpinan kami akan menyiapkan opsi militer tambahan yang jelas disebabkan oleh transformasi Jepang tersebut," ujarnya.

Kim juga menuduh Tokyo sedang berupaya membangun kemampuan melakukan serangan pendahuluan (preemptive strike) terhadap negara lain.

"Kami tidak akan pernah menjadi pengamat pasif terhadap evolusi militer Jepang yang dapat menimbulkan ancaman serius," tegasnya.

Dalam bagian lain pernyataannya, Kim menggunakan diksi yang sangat keras. Ia menyebut Jepang sebagai "keturunan militerisme" yang masih mewarisi "gen kelicikan dan agresi". Menurutnya, jika negara tersebut kembali dipersenjatai dengan senjata-senjata mematikan, kawasan hanya akan menghadapi situasi yang lebih berbahaya.

Kim Yo Jong tidak hanya mengkritik arah kebijakan Jepang secara umum, tetapi juga menyebut sejumlah langkah konkret yang dilakukan Tokyo dalam beberapa bulan terakhir.

Ia menyoroti keberhasilan Jepang melakukan uji coba rudal jelajah



Bendera Jepang dipasang di depan sistem rudal kendali darat-ke-udara saat latihan Pertahanan Udara dan Rudal Terintegrasi (IAMD) dalam latihan multinasional Balikatan di sebuah pangkalan angkatan laut di San Antonio, Zambales, Filipina, pada 28 April 2026. (Anadolu.ist)

Tomahawk buatan Amerika Serikat. Rudal tersebut merupakan bagian dari strategi baru Jepang untuk memiliki kemampuan menyerang sasaran hingga lebih dari 1.000 kilometer sebagai bagian dari konsep counterstrike capability.

Selain itu, Kim menyinggung keterlibatan Pasukan Bela Diri Jepang dalam latihan militer multinasional Balikatan yang dipimpin Amerika Serikat di Filipina pada Mei lalu. Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan Washington terus mendorong langkah-langkah militer Jepang di kawasan Pasifik.

Bagi Pyongyang, dua langkah itu menjadi bukti bahwa Jepang tidak lagi sekadar memperkuat kemampuan bertahan, melainkan sedang membangun kapasitas menyerang yang sebelumnya dihindari selama puluhan tahun.

Pernyataan Kim Yo Jong tidak dapat dipisahkan dari isi buku putih pertahanan terbaru Jepang.

Dalam dokumen setebal ratusan halaman tersebut, Menteri Pertahanan Shinjiro Koizumi menulis bahwa negaranya harus memperkuat kemampuan pertahanan dengan "rasa urgensi dan krisis yang lebih kuat daripada sebelumnya."

Menurut Koizumi, lingkungan keamanan di sekitar Jepang

mengalami perubahan paling drastis sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Ia menyebut bukan hanya China dan Korea Utara yang terus meningkatkan kemampuan militernya, tetapi juga kerja sama strategis antara China-Rusia maupun Rusia-Korea Utara yang semakin erat.

Buku putih itu kembali menempatkan China sebagai tantangan strategis terbesar bagi keamanan Jepang.

Tokyo menilai Beijing terus memperluas aktivitas militernya di Laut China Timur dan Pasifik Barat. Aktivitas tersebut disebut telah bergerak dari kawasan yang dikenal sebagai first island chain menuju second island chain, memperlihatkan jangkauan operasi militer China yang semakin luas.

Pemerintah Jepang juga mencatat beberapa insiden sepanjang 2025, termasuk operasi kapal induk China di sekitar Jepang serta dua manuver udara yang disebut "tidak lazim" ketika pesawat militer China mendekati pesawat Jepang pada Juni dan Juli 2025.

Selain China, Jepang juga menilai Rusia masih menjadi ancaman menyusul meningkatnya aktivitas militernya di Timur Jauh serta

Peningkatan Anggaran dan Target Belanja

- **Anggaran Pertahanan Naik:** Jepang mengesahkan anggaran pertahanan di atas 9 triliun yen (US\$58 miliar), naik 9,4% dari tahun lalu.
- **Target 2% PDB:** Bagian dari program lima tahun untuk meningkatkan belanja pertahanan hingga 2% PDB, dengan pelaksanaan dipercepat.

Fokus Utama Modernisasi Militer

- **Perkuat Rudal Jarak Jauh:** Lebih dari 970 miliar yen dialokasikan untuk rudal jarak jauh, termasuk Type 12 berjangkauan 1.000 km.
- **Pengembangan Drone:** Sekitar 100 miliar yen untuk drone pengawas dan tempur di udara, laut, dan bawah laut.
- **Kolaborasi Alutsista:** Mengembangkan pesawat tempur generasi baru bersama Inggris dan Italia (target 2035), serta pencegat rudal hipersonik bersama AS.

Perubahan Kebijakan Ekspor Pertahanan

- **Ekspor Alutsista Dilonggarkan:** Jepang melonggarkan aturan ekspor sehingga membuka peluang penjualan kapal perang, rudal, dan alutsista lain ke negara mitra strategis.



hubungan pertahanan yang semakin erat dengan Korea Utara.

Data dalam buku putih menunjukkan intensitas pengawasan udara Jepang masih sangat tinggi.

Sepanjang tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2026, Pasukan Bela Diri Udara Jepang mengerahkan jet tempur sebanyak 595 kali untuk mengidentifikasi maupun menghalau pesawat asing yang mendekati wilayah udaranya.

Sebanyak 366 pengerahan dilakukan untuk merespons aktivitas pesawat militer China.

Sementara 214 kali pengerahan dilakukan terhadap pesawat Rusia.

Meski lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 704 kali, angka tersebut tetap menunjukkan tingginya tensi keamanan di kawasan Asia Timur.

Modernisasi militer Jepang juga tercermin dari lonjakan anggaran pertahanan. Menurut data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), belanja militer Jepang pada 2025 mencapai sekitar US\$62,2 miliar, naik 9,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut setara sekitar 1,4 persen PDB, tertinggi sejak 1958. (gus,ist,kum/dya)

Air Mineral Sultan: Dijual Rp168 Ribu/Botol, Istimewanya Apa?

Air mineral selama ini identik sebagai kebutuhan pokok yang mudah dijangkau. Namun, di segmen premium, air minum telah bertransformasi menjadi bagian dari gaya hidup mewah. Tak sedikit restoran berbintang Michelin, hotel kelas dunia, hingga acara jamuan eksklusif menghadirkan daftar air mineral (water menu) layaknya daftar anggur.

Fenomena tersebut mendorong lahirnya berbagai merek air mineral premium dengan harga puluhan hingga ratusan ribu rupiah per botol. Nilai jualnya bukan sekadar untuk menghilangkan dahaga, tetapi juga berasal dari sumber mata air yang langka, kandungan mineral alami, proses penyaringan, desain kemasan, hingga citra eksklusif yang dibangun. Berikut enam merek air mineral premium dari berbagai negara yang dikenal memiliki harga tinggi.

VOSS Still Water, kesederhanaan dari Norwegia

VOSS menjadi salah satu merek air mineral premium paling dikenal di dunia. Airnya berasal dari mata air

yang terlindungi di wilayah selatan Norwegia dengan kandungan mineral yang rendah sehingga menghasilkan rasa yang ringan dan bersih.

Ciri khas lainnya adalah botol kaca silinder minimalis yang dirancang mantan Creative Director Calvin Klein, Neil Kraft. Desain tersebut menjadi salah satu alasan VOSS kerap hadir di hotel dan restoran mewah. Harga satu botol kaca berukuran 800 ml sekitar US\$2,40 atau sekitar Rp43 ribu.

Driftless Fine Water, air berusia 10 ribu tahun

Driftless Fine Water berasal dari Wisconsin, Amerika Serikat. Air ini memiliki pH sekitar 7,6 dan berasal dari akuifer purba yang diperkirakan berusia 10 ribu tahun.

Air disaring secara alami melalui lapisan batu kapur tanpa proses kimia tambahan. Merek ini juga dikenal karena menggunakan kemasan kaca serta mendukung pertanian organik melalui sebagian hasil penjualannya.

Satu botol ukuran 750 ml dipasarkan sekitar US\$5,69 atau sekitar Rp92 ribu. Aur'a Natural Gold Water, mengandung emas dan perak koloid. Berbeda dari merek lain, Aur'a Natural Gold Water asal Rumania

menawarkan konsep yang lebih eksklusif dengan kandungan koloid emas dan perak. Air ini memiliki pH alkali sekitar 8,28 dan bersumber dari Mata Air Ursoanea di kaki Pegunungan Golden Hawk.

Selain menonjolkan kemurnian air, produsen memasarkan produk ini sebagai minuman premium yang mengandung antioksidan. Harga satu botol ukuran 750 ml mencapai sekitar 4,5 pound sterling atau sekitar Rp94 ribu.

Antipodes Still Water, ramah lingkungan dari Selandia Baru

Antipodes Still Water berasal dari akuifer bawah tanah di Selandia Baru yang mengalami filtrasi alami selama puluhan hingga ratusan tahun melalui batuan vulkanik.

Air ini memiliki pH netral dengan kandungan silika alami yang memberikan tekstur lembut saat diminum. Botol kacanya bergaya apothecary klasik dan menjadi kemasan air pertama di dunia yang memperoleh sertifikasi carbon neutral. Harga per liter sekitar US\$6 atau sekitar Rp108 ribu.

Vichy Catalan Sparkling Water, rasa asin alami

Air mineral berkarbonasi asal Spanyol ini berasal dari mata air panas

alami di Caldes de Malavella. Berbeda dengan air mineral pada umumnya, Vichy Catalan memiliki kandungan natrium dan bikarbonat yang tinggi sehingga menghasilkan cita rasa sedikit asin. Di Spanyol, air ini lazim disajikan sebagai pendamping hidangan.

Harga satu botol ukuran satu liter sekitar US\$7 atau sekitar Rp126 ribu.

Vellamo Sparkling Water, termahal dalam daftar

Posisi teratas ditempati Vellamo Sparkling Natural Mineral Water asal Finlandia.

Air ini berasal dari akuifer yang terbentuk sejak zaman es sehingga diklaim sangat murni. Dengan pH alami sekitar 8,3, Vellamo dipasarkan sebagai sparkling water premium dengan desain botol menyerupai balok es yang mencair.

Harga satu botol ukuran 500 ml mencapai sekitar US\$9,29 atau setara Rp168 ribu.

Di sejumlah negara Eropa dan Amerika Utara, budaya fine water berkembang pesat layaknya dunia kopi spesialti atau wine. Dipelopori oleh organisasi seperti Fine Water Society, tren ini memperkenalkan cara baru mengapresiasi air minum mulai dari asal-usul sumber mata airnya, kaya-miskinnya kandungan mineral, hingga karakter rasa yang ditinggalkan di lidah. Restoran kelas atas pun kini rutin menyajikan daftar pilihan air mineral eksklusif dari berbagai belahan dunia untuk melengkapi pengalaman bersantap para tamu.

Meski gaya hidup ini kian populer, para pakar gizi dan lembaga kesehatan internasional mengingatkan bahwa belum ada bukti ilmiah kuat yang membuktikan air mineral premium lebih menyehatkan daripada air minum biasa yang layak konsumsi.

Manfaat kesehatan sejati tetap bersumber dari kecukupan asupan cairan harian dan jaminan kualitas air yang aman serta bebas kontaminasi.

Oleh karena itu, fenomena fine water lebih tepat dipandang sebagai bentuk gaya hidup dan pengalaman sensori kuliner ketimbang sebuah kebutuhan medis. Bagi masyarakat umum, memilih air minum yang terjangkau namun sudah teruji higienis dan memenuhi standar kesehatan jauh lebih penting daripada mengejar label premium yang mahal. (farist/dya)



Wajah AI Kini Kian Sulit Dibedakan dari Manusia, Waspada

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat wajah hasil rekayasa digital semakin menyerupai manusia sungguhan. Bahkan, banyak orang kini kesulitan membedakan mana foto manusia asli dan mana yang sepenuhnya dibuat oleh AI.

Fenomena tersebut bukan sekadar persoalan teknologi, tetapi telah berkembang menjadi ancaman keamanan digital. Penipuan berbasis deepfake, pencurian identitas, hingga penyamaran dalam panggilan video semakin marak seiring meningkatnya kualitas gambar yang dihasilkan AI.

Sebuah penelitian terbaru dari tim psikolog internasional yang dipimpin Profesor Amy Dawel dari Australian National University (ANU) menunjukkan, meski manusia saat ini masih lemah dalam mengenali wajah AI, kemampuan tersebut ternyata dapat dilatih secara signifikan.

Hasil riset itu dipublikasikan pada Juni 2026 di jurnal ilmiah PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Sudah Menelan Korban Miliaran Rupiah

Urgensi penelitian ini semakin besar setelah berbagai kasus penipuan berbasis AI terjadi di berbagai negara.

Salah satu yang paling menyita perhatian terjadi di Hong Kong pada 2024. Seorang pegawai perusahaan mengikuti rapat daring bersama orang-orang yang diyakininya sebagai rekan kerja, termasuk kepala bagian keuangan.

Belakangan diketahui seluruh

peserta rapat tersebut merupakan deepfake yang dihasilkan AI. Pegawai tersebut telanjur mentransfer dana sekitar US\$25 juta atau setara lebih dari Rp450 miliar sebelum menyadari dirinya menjadi korban penipuan.

Kasus serupa diperkirakan akan terus meningkat. Laporan perusahaan konsultan Deloitte pada 2024 memproyeksikan kerugian akibat penipuan berbasis AI di Amerika Serikat saja dapat mencapai US\$40 miliar dalam beberapa tahun mendatang.

Mengapa Wajah AI Sulit Dikenali?

Berbeda dengan anggapan umum, wajah hasil AI modern tidak lagi dipenuhi kesalahan mencolok seperti mata yang tidak simetris atau aksesoris yang janggal.

Model AI generasi terbaru justru menghasilkan wajah yang sangat proporsional.

Menurut Amy Dawel, hal tersebut terjadi karena algoritma AI dilatih menggunakan jutaan foto

manusia, kemudian membentuk wajah berdasarkan rata-rata statistik dari seluruh data tersebut.

Akibatnya, wajah AI cenderung terlihat lebih simetris, lebih menarik, dan lebih "normal" dibanding wajah manusia asli. Fenomena itu disebut para peneliti sebagai AI hyperrealism.

"Wajah AI sebenarnya lebih menyerupai rata-rata wajah manusia dibanding manusia itu sendiri," jelas Dawel.

Ironisnya, justru karena terlalu sempurna, banyak orang menganggap wajah AI lebih dapat dipercaya daripada wajah manusia asli.

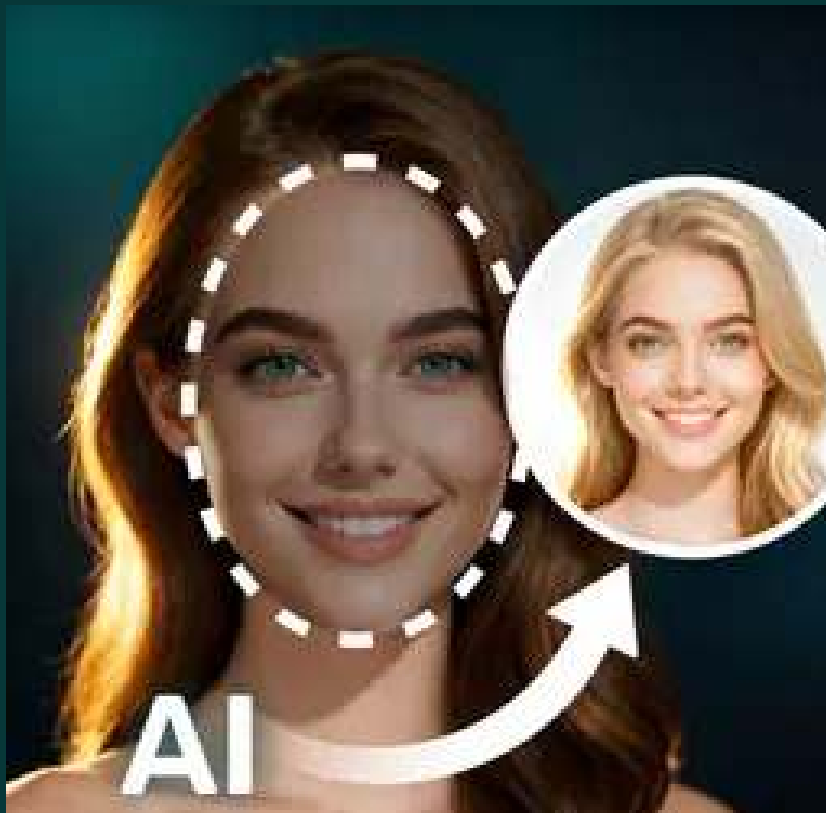
Pelatihan 1 Jam, Akurasi Meningkat

Dalam penelitian tersebut, 45 orang dewasa diminta mengidentifikasi wajah AI dari serangkaian foto. Hasil awal menunjukkan kemampuan peserta masih rendah. Tingkat akurasi rata-rata hanya 41 persen, atau bahkan lebih buruk daripada sekadar menebak.

Para peserta kemudian mengikuti pelatihan selama sekitar satu jam.

Alih-alih diajarkan mencari "kesalahan" pada gambar, peserta diminta menilai enam karakter wajah secara keseluruhan, yaitu: Kekhasan wajah; Kemudahan diingat; Tingkat ekspresi; Simetri; Proporsi dan Daya tarik.

Pendekatan ini memanfaatkan cara alami otak manusia mengenali wajah, yakni melihat keseluruhan wajah, bukan menganalisis satu per satu bagian seperti mata, hidung, atau mulut. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.



Stripes Kembali Jadi Primadona, Motif Klasik Segala Gaya

Setelah beberapa musim didominasi warna-warna polos dan estetika quiet luxury, motif garis atau stripes kembali menjadi sorotan di dunia mode. Pada koleksi Spring/Summer 2026, berbagai rumah mode menghadirkan interpretasi baru terhadap motif klasik ini, mulai dari garis vertikal tebal bergaya cabana, Breton stripes yang ikonik, hingga pola grafis yang lebih modern.

Kembalinya stripes tak hanya terlihat di atas panggung peragaan busana, tetapi juga di gaya para selebritas dan street style. Motif yang identik dengan nuansa laut dan musim panas itu kini hadir dalam beragam potongan, seperti gaun, kemeja, celana panjang, shorts, hingga aksesoris.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa stripes bukan sekadar tren musiman, melainkan motif klasik yang terus berevolusi mengikuti selera zaman.

Dari Seragam Pelaut

Sejarah stripes dalam dunia fashion bermula dari Breton stripes atau marinière, seragam Angkatan Laut Prancis yang diperkenalkan pada 1858. Garis horizontal biru-putih saat itu dirancang agar pelaut lebih mudah terlihat jika terjatuh ke laut.

Popularitasnya berubah drastis ketika desainer legendaris Coco Chanel memasukkan motif tersebut ke koleksi pakaian resor pada awal abad ke-20. Sejak saat itu, Breton stripes menjadi simbol gaya kasual khas Prancis yang

elegan. Pada dekade berikutnya, motif garis semakin identik dengan ikon budaya populer seperti Marilyn Monroe, James Dean, hingga Pablo Picasso. Dunia haute couture kemudian memperkuat posisinya melalui koleksi sailor yang diperkenalkan Yves Saint Laurent pada 1966.

Cabana Stripes Jadi Bintang

Jika Breton stripes identik dengan garis horizontal tipis, maka musim panas 2026 diramaikan oleh cabana stripes—garis vertikal berukuran besar dengan kombinasi dua warna kontras.

Motif ini mengingatkan pada payung pantai, kursi santai di resor, hingga suasana liburan di kawasan Mediterania seperti Amalfi Coast atau Cannes. Kesan santai namun tetap rapi membuatnya mudah dikenakan dalam berbagai kesempatan.

Sejumlah selebritas juga terlihat mengenakan motif ini. Anne Hathaway tampil mengenakan gaun bergaris hitam-putih saat rangkaian promosi film *The Devil Wears Prada 2*, sementara Taylor Swift beberapa kali tertangkap kamera memakai gaun bergaris vertikal saat berada di New York.

Menurut pengamat mode internasional, meningkatnya popularitas cabana stripes sejalan dengan tren resort wear, dopamine dressing, dan meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya berpakaian

yang memberi nuansa liburan.

Motif garis mendominasi berbagai koleksi Spring/Summer 2026.

Rumah mode seperti Hermès menghadirkan garis-garis bernuansa Mediterania yang lembut, sementara Louis Vuitton mengeksplorasi motif bergaris bergaya grafis dan hand-painted. Prada juga memasukkan stripes ke dalam siluet formal maupun kasual. Di segmen yang lebih terjangkau, berbagai merek seperti Zara, Mango, Reformation, hingga Staud turut menghadirkan koleksi bergaris dalam berbagai model.

Hal ini membuat tren stripes mudah diakses oleh konsumen dengan beragam anggaran. Analisis mode menilai stripes memiliki keunggulan yang jarang dimiliki motif lain. Selain bersifat timeless, motif ini juga mudah dipadukan dengan berbagai gaya, mulai dari tampilan formal kantor, gaya kasual akhir pekan, hingga busana liburan.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen juga cenderung mencari pakaian yang praktis namun tetap terlihat menarik. Motif garis dinilai memenuhi kebutuhan tersebut karena mampu memberikan karakter pada penampilan tanpa terlihat berlebihan.

Bagi masyarakat Indonesia, tren ini dinilai relevan karena mudah dipadukan dengan material yang nyaman untuk iklim tropis seperti linen, katun, maupun rayon. (farist/dya)



Utang Whoosh Kini ...dari Hal 1

Setelah berbulan-bulan dibahas di internal pemerintah, penanganan restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) akhirnya menemukan titik terang. Pemerintah memutuskan mengalihkan proses restrukturisasi dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) ke Kementerian Keuangan.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa usai bertemu Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (5/8/2026). Menurut Purbaya, proses pengalihan ditargetkan selesai paling lambat pertengahan September 2026.

"Pembahasan yang pertama adalah Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung. Ini kan diserahkan dari Danantara ke Kementerian Keuangan. Prosesnya kita percepat, mungkin pertengahan September sudah akan clear," kata Purbaya.

Pengalihan tersebut tidak hanya menyangkut restrukturisasi utang. Kementerian Keuangan juga akan mengambil alih pengelolaan kepemilikan Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), perusahaan patungan yang mengoperasikan layanan Whoosh.

Purbaya menjelaskan, pengelolaan itu akan dilakukan melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV) di bawah Kementerian Keuangan. Menurut dia, mekanisme tersebut dipilih agar penyelesaian kewajiban KCIC tidak langsung menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dialihkan ke Kemenkeu, dikelola saya semuanya KCIC itu. Tapi nanti akan kita pakai salah satu tangan SMV fiskal kita untuk mengelola itu. Kita kan punya banyak juga, ada SMI, ada ini dan lain-lain. Jadi enggak langsung jadi tanggung jawab APBN. Jadi walaupun oleh pemerintah, tidak akan membebani APBN," ujar Purbaya.

Pernyataan tersebut menjawab spekulasi mengenai skema penyelesaian utang proyek kereta cepat yang dalam beberapa bulan terakhir disebut telah memasuki tahap akhir. Sebelumnya, pemerintah beberapa kali menyatakan substansi restrukturisasi telah disepakati, tetapi penyelesaiannya masih menunggu proses administrasi dan pengalihan aset.

Selain restrukturisasi utang, perubahan juga terjadi pada struktur kepemilikan Indonesia di KCIC. Purbaya mengatakan kepemilikan saham Indonesia tidak lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero), melainkan akan dikelola Kementerian Keuangan.

KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dan China. Sebanyak 60 persen saham dimiliki konsorsium Indonesia melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persen sisanya dimiliki konsorsium perusahaan China.

"(Kepemilikan KCIC) di saya, bukan (di bawah KAI). Enam puluh persen kasih ke kita, 40 persen ada yang lain, masih ada China di situ kan," kata Purbaya.

Ia juga mengatakan pemerintah telah berkomunikasi dengan mitra dari China mengenai kelanjutan proyek tersebut. Menurut Purbaya, pihak China masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan kerja sama dan membuka peluang pembahasan mengenai perpanjangan jalur kereta cepat.

"Kita tanya ke China juga seperti mereka masih mau melanjutkan proyek ini dan mungkin kalau disuruh kita akan perpanjang ke Jawa Timursana."

Meski demikian, pemerintah belum mengungkapkan nilai kewajiban yang akan dialihkan ke Kementerian Keuangan. COO Danantara Dony Oskaria mengatakan proses penghitungan masih berlangsung dan akan diumumkan bersamaan dengan penyelesaian pengalihan aset.

"Pada saat penyerahan nanti ya, details-nya akan dihitung. Pertengahan September paling lambat," kata Dony.

Rencana pengalihan tersebut menjadi tindak lanjut dari pembahasan restrukturisasi yang telah berlangsung sejak 2025. Pada Maret 2026, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan pemerintah telah menyepakati skema restrukturisasi pembiayaan proyek Whoosh. AHY ketika itu mengatakan pembahasan teknis telah selesai dan pemerintah tinggal menyelesaikan aspek administratif sebelum kebijakan dijalankan.

Pernyataan serupa juga disampaikan Dony Oskaria beberapa waktu kemudian. Ia menyebut restrukturisasi utang Whoosh secara substansi telah selesai dan tinggal menunggu pengumuman resmi pemerintah setelah seluruh dokumen administrasi dirampungkan.

Pembengkakan Biaya hingga Restrukturisasi

Keputusan pemerintah mengalihkan restrukturisasi utang Whoosh ke Kementerian Keuangan menjadi fase terbaru dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang

telah berjalan hampir satu dekade. Persoalan yang kini dihadapi pemerintah bukan lagi menyelesaikan pembangunan, melainkan menata struktur pembiayaan agar perusahaan pengelola memiliki ruang untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai digarap setelah Indonesia dan China menyepakati kerja sama pembangunan jalur kereta cepat sepanjang sekitar 142 kilometer pada 2015. Pemerintah saat itu menegaskan proyek dikerjakan dengan skema business to business (B2B) melalui perusahaan patungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), tanpa menggunakan jaminan pemerintah.

KCIC dibentuk sebagai perusahaan patungan antara konsorsium Indonesia dan China. Di pihak Indonesia, kepemilikan saham berada di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang beranggotakan PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero), dan PTPN VIII. Konsorsium Indonesia menguasai 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen sisanya dimiliki konsorsium perusahaan China.

Dalam perkembangannya, proyek menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pembebasan lahan, penyesuaian desain, dampak pandemi Covid-19, hingga kenaikan biaya konstruksi. Pemerintah kemudian menetapkan adanya cost overrun atau pembengkakan biaya proyek.

Berdasarkan data pemerintah dan KCIC, nilai investasi proyek yang semula diperkirakan sekitar US\$6,07 miliar meningkat menjadi sekitar US\$7,27 miliar. Kenaikan biaya tersebut membuat struktur pembiayaan proyek ikut berubah.

Pemerintah kemudian memberikan dukungan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero), sementara KCIC tetap memiliki kewajiban kepada lembaga pembiayaan yang mendanai proyek, termasuk China Development Bank (CDB).

Whoosh mulai beroperasi secara komersial pada Oktober 2023. Sejak itu, perhatian pemerintah beralih dari penyelesaian konstruksi menuju keberlanjutan pembiayaan proyek.

Sebelum Kementerian Keuangan resmi mengambil alih penanganan restrukturisasi utang Whoosh, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat menjadi sorotan karena komentarnya mengenai penyelesaian kewajiban proyek tersebut.

Pada November 2025, ketika ditanya mengenai opsi penyelesaian

RESTRUKTURISASI WHOOSH

Apa yang diputuskan?

- Kementerian Keuangan mengambil alih restrukturisasi Whoosh dari Danantara.
- Target pengalihan selesai pada pertengahan September 2026.

Apa yang dialihkan?

- Penanganan restrukturisasi utang Whoosh.
- Pengelolaan 60% saham Indonesia di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Siapa yang mengelola?

- Kementerian Keuangan melalui salah satu Special Mission Vehicle (SMV).
- Opsi SMV yang disebut Purbaya antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

Bagaimana skemanya?

- Pengelolaan dilakukan oleh SMV Kemenkeu.
- Pemerintah menegaskan tidak menjadi beban langsung APBN.

Berapa nilai utangnya?

- Belum diumumkan.
- COO Danantara Dony Oskaria menyatakan nilai utang masih dalam proses penghitungan.

Profil proyek Whoosh

- Nilai investasi awal: US\$6,07 miliar.
- Membengkak menjadi: US\$7,27 miliar (sekitar Rp120 triliun).
- Skema pembiayaan: sekitar 75% pinjaman dan 25% ekuitas.

Struktur kepemilikan KCIC

- 60% konsorsium Indonesia (dialihkan ke Kemenkeu).
- 40% konsorsium China.



utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Purbaya mengatakan, "Kalau saya mending nggak bayar." Pernyataan itu kemudian banyak dikutip karena pemerintah mengenai berbagai alternatif penyelesaian pembiayaan proyek.

Namun, dalam kesempatan yang sama Purbaya menegaskan bahwa pernyataan tersebut merupakan pandangan pribadinya. Ia mengatakan keputusan mengenai penyelesaian utang Whoosh sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau saya mending nggak bayar. Tapi nanti kita lihat keputusan Presiden seperti apa," kata Purbaya saat itu. (wod,rls,kum kcm/dya)



KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 Disepakati DPRD JATIM: INFRASTRUKTUR HINGGA TUNJANGAN PROFESI GURU JADI PRIORITAS

SURABAYA— DPRD Jawa Timur (Jatim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) resmi menyepakati Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Rabu (05/08/2026). Ini menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2026. Fokusnya pada penguatan program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono dan dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Sebelum penandatanganan nota kesepakatan, Sekretaris DPRD Jawa Timur Ali Kuncoro membacakan dokumen yang memuat arah kebijakan perubahan anggaran tahun 2026.

Dalam dokumen tersebut dijelaskan, perubahan APBD diprioritaskan untuk memenuhi target indikator kinerja utama yang belum tercapai dan mengakomodasi pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD yang belum terfasilitasi dalam APBD murni 2026. Selain itu juga memenuhi belanja wajib dan mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, target pendapatan daerah dalam perubahan APBD juga akan dibahas bersama alat kelengkapan dewan sesuai potensi riil di masing-masing sektor agar penyusunan anggaran lebih realistis dan terukur.

"Prioritas belanja daerah di antaranya untuk memenuhi target indikator kinerja utama yang belum tercapai, mengakomodasi dan merealisasikan pokok-pokok pikiran (Pokir) yang belum terakomodasi pada APBD Tahun 2026," ungkap Ali Kuncoro.

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mengatakan, perubahan KUA-PPAS 2026 diarahkan untuk memperkuat program-program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang manfaatnya dapat di-



Pimpinan DPRD Jawa Timur dan Gubernur Jawa Timur saat penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA-P) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/8/2026). (ist.DPRDJatim)

rasakan langsung oleh masyarakat. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur.

"Perubahan KUA-PPAS ini difokuskan untuk memperkuat program-program prioritas Gubernur dan Pemprov Jatim yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Di tengah kondisi saat ini, belanja modal untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama," terang Deni.

Penasihat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu menjelaskan, penguatan pembangunan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak setelah banyak pemerintah desa mengalami keterbatasan ruang fiskal akibat perubahan kebijakan penggunaan dana desa. Akibatnya, berbagai kebutuhan pembangunan dasar di tingkat desa tidak lagi dapat dipenuhi secara optimal.

Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dalam berbagai agenda reses anggota DPRD Jawa Timur. Aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat masih berkaitan dengan pembangunan jalan desa, saluran irigasi, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

"Dengan bergesernya penggunaan dana desa, banyak wilayah yang tidak lagi mampu melakukan pembangunan secara maksimal. Karena itu, pemerintah provinsi harus hadir memperkuat pembangunan di wilayah-wilayah tersebut sesuai

kewenangannya," jelasnya.

Deni mengatakan, hasil reses DPRD Jawa Timur menunjukkan hampir seluruh kepala desa mengeluhkan minimnya anggaran pembangunan infrastruktur di tingkat desa. Bahkan, terdapat desa yang hanya memiliki alokasi anggaran infrastruktur sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta sehingga dinilai belum mampu menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat.

"Hampir di setiap titik reses, keluhan terbesar datang dari para kepala desa terkait pembangunan infrastruktur. Anggaran infrastruktur desa saat ini sangat terbatas, bahkan ada yang hanya sekitar Rp25 juta hingga Rp100 juta sehingga tidak cukup untuk melakukan pembangunan yang berarti. Itu menjadi pekerjaan rumah bersama dan menjadi salah satu alasan mengapa pembangunan infrastruktur diprioritaskan dalam Perubahan APBD 2026," paparnya.

Ia mengungkapkan, total anggaran dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp2,6 triliun akan diarahkan pada program-program yang memiliki dampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Meski pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama, Deni memastikan berbagai program sosial tetap memperoleh perhatian dalam perubahan anggaran tahun ini. Di antaranya program beasiswa, Kewirausahaan Inklusif

Produktif Jawa Timur Sejahtera (Jawara), rehabilitasi rumah tidak layak huni (Rutilahu), serta berbagai program pelayanan masyarakat lainnya.

"Intinya, banyak program yang dimaksimalkan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Kalau bicara kebutuhan anggaran, berapa pun tentu masih terasa kurang. Karena itu diperlukan skala prioritas, dan salah satunya diarahkan pada pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni menegaskan, arah Perubahan APBD 2026 memang difokuskan untuk mendukung berbagai program prioritas Gubernur Jawa Timur. Menurutnya, pembangunan infrastruktur menjadi sektor yang diprioritaskan karena manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Untuk Perubahan APBD lebih dialokasikan di program-program prioritas gubernur, salah satunya untuk infrastruktur yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," ujar Sri Wahyuni.

Selain pembangunan infrastruktur, DPRD Jawa Timur juga memperjuangkan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) agar dapat membantu penyelesaian pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) yang hingga kini masih menysikan hak para guru dari pemerintah pusat.

"Ada juga dari BTT kemarin diperjuangkan untuk bisa dialokasikan untuk TPG, Tunjangan Profesi Guru yang setahun ini ada hak mereka yang belum diterimakan dari pusat," katanya. Menurut Politisi Demokrat itu, perhatian terhadap TPG merupakan bentuk komitmen DPRD Jawa Timur dalam memperjuangkan hak-hak tenaga pendidik. Selain itu, perubahan anggaran juga akan memperkuat sejumlah program prioritas lainnya melalui skema bantuan sosial.

"Dan beberapa program prioritas lain dalam bentuk bansos," pungkasnya. (adv,pra/dya)